

DAFTAR PUSTAKA

- Arumningtias, D. (2020). Tinjauan Potensi Tax Avoidance Terkait Penerapan PP 23 Tahun 2018 Sebagai Pengganti PP 46 Tahun 2013.
- Diektorat Jenderal Pajak. (2013). Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Fasilitas dan Insentif Pajak Penghasilan Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan*. Direktorat Jenderal Pajak: Jakarta.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ibrahim, S. (2013). Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. *Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal*, 1-10.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. 3.
- Kasim, E. S., & Purwanto, T. A. (2020). Perbandingan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas UKM di Indonesia Dengan Negara-Negara Anggota OECD. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 1-13.

Kementerian Keuangan. (2021, 09 27). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 50-59.

Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 51-67.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.3/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan yang

Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Puspita Ayu, B. D. (2019). Pengaruh Insentif Pajak dan Insentif Non-Pajak Dalam Manajemen Laba.

Risa, N., & Sari, M. R. (2021). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 20-37.

Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 33-64.

Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukaryo, & Oktavia. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Indonesia Dengan Menggunakan Skema Gain/Loss. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 128-144.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-26/PJ.22/2006 tentang Tindak Lanjut Key Performance Indicator (KPI).

Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Megister Akuntansi Trisakti*, 121-144.

Thuronyi, V. (2003). Presumptive Taxation of the Hard-To-Tax.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . t

Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2-19.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Yitzhaki, S. (2007). Cost-Benefit Analysis of Presumptive Taxation.